



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TINA TREESTIANA KEMALA INTAN
2. Jabatan : DIREKTUR SDM, TATA KELOLA, & MANAJEMEN RISIKO
3. NHK : 59191

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 29.920.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m²/275 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.210.000.000
2. Tanah Seluas 194 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m²/90 m² di KAB / KOTA KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m²/102 m² di KAB / KOTA KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m²/210 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m²/250 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 10.450.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m²/144 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 167.000.000

1. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.825.000.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 524.377.331**F. HARTA LAINNYA** Rp. 4.903.683.383

Sub Total Rp. 39.340.060.714



III. HUTANG

Rp. 1.041.692.226

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 38.298.368.488

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.